

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 revisian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberian otonomi daerah harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus dan bertanggung jawab atas daerahnya itu sendiri. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan daerah secara ekonomis, maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Menurut penelitian Rinny (2011) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bau-Bau” menjelaskan bahwa kemampuan pendanaan dari suatu daerah untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat vital. Oleh karena itu otonomi daerah tanpa tunjangan oleh kemampuan dalam bidang pendanaan adalah sangat tidak mungkin untuk dapat berjalan dengan baik. Dana yang sangat besar selain diperlukan untuk membayar belanja pegawai, juga diperlukan dalam rangka pembiayaan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk membiayai program dan proyek didaerah. Jadi suatu daerah tidak mungkin dapat beroperasi dengan baik jika dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tanpa adanya pembiayaan yang memadai.

Widjaja dalam Syaifullah (2016) salah satu indikasi yang menunjukkan suatu daerah itu dapat dikatakan mampu dalam mengurus rumah tangganya sendiri adanya mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangan sendiri atau memenuhi syarat adanya kesiapan Sumber Daya Manusia

(SDM) aparatur yang berkeadilan, adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah, bahwa otonomi daerah yang dapat kita terapkan adalah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Dimana, pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa bagi warga Negara Indonesia sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Apabila tuntutan PAD besar, maka kegiatan yang akan dilakukan pemerintah juga semakin banyak. Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memaksimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah walaupun sampai saat ini retribusi belum familiar di kalangan masyarakat.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu PAD dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PAD pada sektor retribusi daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan pengelolaannya.

Retribusi sebagai salah satu PAD yang dapat membantu permasalahan kehidupan masyarakat. Pihak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bertujuan untuk peningkatan penerimaan daerah yang diperlukan bagi keperluan dana pembangunan yang berasal dari sumber-sumber PAD.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Menurut Proyeksi BPS (Jiwa)

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Kab Bengkulu Menurut Proyeksi BPS (Jiwa)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0-4	26 944	26 413	25 999	26 486	26 074	25 762
5-9	30 906	29 935	28 916	29 235	28 582	27 551
10-14	29 583	30 077	30 275	27 262	27 486	27 869
15-19	24 440	25 028	25 642	22 735	23 195	23 589
20-24	19 836	19 480	19 435	19 031	19 006	19 146
25-29	24 079	23 519	22 719	22 094	21 507	20 998
30-34	24 542	24 688	24 864	24 476	24 315	23 972
35-39	23 483	23 644	23 734	22 364	22 623	22 886
40-44	20 972	21 196	21 478	20 382	20 577	20 655
45-49	18 024	18 407	18 695	17 188	17 634	18 144
50-54	14 295	14 854	15 348	13 751	14 503	15 129
55-59	10 568	10 922	11 411	9 976	10 496	11 162
60-64	8 485	8 818	9 072	7 268	7 595	7 895
65-69	5 128	5 653	6 137	4 898	5 305	5 667
70-74	2 162	2 367	2 684	2 468	2 620	2 861
75+	2 173	2 227	2 261	2 473	2 612	2 733
TOTAL	285 620	287 228	288 670	272 087	274 130	276 019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu

Kabupaten Bengkulu memiliki 11 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bengkulu, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Rupa, Rupa Utara dan Talang Muandau. Kabupaten Bengkulu juga memiliki 7 (tujuh) Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Sampah (UPT PS). Berdasarkan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu menimbulkan berbagai permasalahan di kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah masalah persampahan. Sampah dalam pengelolaannya banyak sekali mengalami kendala. Pemerintah kurang tegas dalam melakukan sesuatu yang dapat menjadikan kebijakan yang tepat misalnya dalam penetapan tarif retribusi. Salah satu pelayanan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu yaitu adanya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk dalam retribusi jasa umum yang diberikan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat.

Dengan adanya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, di harapkan mampu mengatasi masalah PAD dan sampah khususnya di Kabupaten Bengkulu. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu mengatur kembali kebijakan retribusi

daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan Perda tersebut sudah ditetapkan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD. Selain itu, kebijakan dari pemerintah juga harus berlaku agar terciptanya retribusi yang baik. Kebijakan dari pemerintah tersebut, juga untuk mengatur kesadaran terhadap masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Keberadaan pelayanan retribusi sampah, nantinya dikelola oleh petugas dan diberikan imbalan oleh masyarakat. Artinya, apa yang telah dikerjakan merupakan jasa yang diberikan kepada konsumen (*kompasiana.com*).

Seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Maka dari itu pemerintah daerah melakukan suatu kebijakan dalam hal ini tentang pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian harus ada perhatian baik dari pemerintahan maupun masyarakat dalam menanggapi bagaimana melakukan pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bengkalis
2. Bagaimanakah efektivitas pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bengkalis ?
3. Apa saja kendala yang terjadi dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bengkalis ?

1.3 Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah-masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus pada Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Batasan-batasan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
2. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2018 sampai pada tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut ini yaitu :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti yang didapat saat melakukan penelitian.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperbanyak konsep dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini.

c. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instansi dalam penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan, serta menambah jumlah sumber bacaan di perpustakaan Politeknik Negeri Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori-teori yang mendukung dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini diuraikan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.